

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas, peneliti akan menarik kesimpulan bahwa alasan mengapa hubungan kerjasama pemerintah dan perusahaan multinasional asing mampu menyebabkan isu ketidaksetaraan akses air terjadi di India pasca dibuatnya Kebijakan Air Nasional tahun 2002 adalah karena dalam kebijakan tersebut pemerintah India meminta adanya pengalihan kontrol dan layanan pengelolaan air ke perusahaan swasta. Pengalihan kontrol ini bertujuan supaya perusahaan asing yang memiliki ide-ide inovatif dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan atas air yang kurang baik di India.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah India dalam mengundang partisipasi sektor swasta adalah untuk menarik minat perusahaan asing dalam melakukan proyeknya di negara tersebut. Proyek yang dijalankan oleh perusahaan ini mampu menghasilkan adanya aliran investasi asing masuk ke India. Sebagai gantinya, pemerintah India memberikan kemudahan berbisnis dan memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya airnya. Namun pada nyatanya kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pengelolaan air mengalami banyak kekurangan. Seperti contohnya terdapat pada dampak ekonomi dimana perusahaan dengan semena-mena mampu menaikkan tarif harga dan menutup layanan akses air lokal kepada masyarakat terutama yang berada di pedesaan. Dampak kedua ada di bidang lingkungan dimana perusahaan yang memenangkan proyek mampu mengakses sumber daya air India dan diberikan izin untuk mengatur persediaan hal tersebut sehingga tidak sedikit perusahaan yang mengekstraksi dan mengeksploitasi air tanpa adanya upaya yang cukup untuk pemeliharaan dan pelestarian air. Dampak terakhir terdapat pada kurangnya akses air bersih dan sanitasi di banyak wilayah India karena pengaliran air yang terbatas.

Jalannya proyek yang dilakukan oleh perusahaan asing yang dalam penelitian ini tertuju pada perusahaan Suez Degremont, mengalami banyak ketidak optimalan. Ketidak optimalan perusahaan ini tertuju pada kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan di suatu daerah di India bernama Uttar Pradesh dimana pada daerah tersebut, perusahaan mengambil dan mengekstraksi air untuk dialirkan ke wilayah yang lebih metropolitan di India seperti New Delhi. Pengekstraksian air ini menyebabkan adanya kekurangan akses air yang dibutuhkan oleh masyarakat di Uttar Pradesh.

4.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berwenang untuk membuat kebijakan air nasional India agar dalam penulisan kebijakan ini, pemerintah harus mampu mengedepankan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan kepentingan untuk mendapatkan investasi asing dengan mengundang partisipasi sektor swasta dan perusahaan asing untuk melakukan proyek tata kelola air di India. Dalam penelitian ini, terlihat beberapa keresahan masyarakat yang disebabkan oleh hal tersebut sehingga saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada pemerintah India adalah untuk melakukan pengaliran air yang seimbang antara masyarakat di kelas menengah ke atas yang berada di wilayah perkotaan dan masyarakat di kelas menengah ke bawah yang berada di wilayah pedesaan.

Saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas topik yang sama dengan penelitian ini adalah untuk peneliti supaya dapat menjelaskan lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu ketidaksetaraan akses air baik di negara India maupun negara lainnya dengan menggunakan perspektif dan sudut pandang yang berbeda dari penelitian ini sehingga hal tersebut dapat memunculkan analisis dan argumen baru untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional.